

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2016 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2016. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Cilegon baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2016. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2016 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Cilegon.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antarkomponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.

Secara umum kondisi perekonomian kota Cilegon tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 5,93 persen, jika dibandingkan dengan kondisi 2012 perekonomian Cilegon melambat 1,77 persen namun hal ini dinilai wajar karena kondisi perekonomian nasional dan Banten juga mengalami perlambatan. Melambatnya perekonomian merupakan salah satu indikator bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi baru sebatas meningkatnya kuantitas output perekonomian, namun tidak diikuti dengan adanya perbaikan kualitas perekonomian baik itu struktur, teknologi produksi dan sebagainya.

Kondisi perekonomian seperti ini menjadi tantangan bagi semua pihak terkait di kota Cilegon untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau dalam kata lain pembangunan ekonomi.

Angka pertumbuhan ekonomi kota Cilegon di tahun 2013 sebesar 5,93 persen dengan sektor industri pengolahan masih menjadi penyokong utama perekonomian Cilegon dengan kontribusi

sektoral sebesar 70,26 persen, hal ini semakin menegaskan kedudukan kota Cilegon sebagai daerah sentral perindustrian.

Pada tahun 2014 ekonomi Kota Cilegon mampu tumbuh sebesar 5,47 persen, melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,93 persen. Kelambatan yang terjadi sepanjang tahun 2014 berasal dari penurunan aktivitas di hampir seluruh sektor perekonomian di Kota Cilegon.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu.

Berbanding lurus dengan kondisi perekonomian nasional dan Banten yang melambat, perekonomian kota Cilegon pada tahun 2013 mengalami perlambatan. Pada tahun 2012 perekonomian Cilegon mampu tumbuh sebesar 7,70 persen dan berada di atas angka nasional maupun Banten. Sedangkan pada tahun 2013 perekonomian Cilegon tumbuh melambat menjadi 5,93 persen. Meskipun angka pertumbuhan ini masih di atas nasional dan Banten, tapi tentunya kondisi ini menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan di Kota Cilegon.

Sektor industri pengolahan tetap merupakan tulang punggung perekonomian Kota Cilegon, terutama industri kimia dan industri baja. Sektor industri pengolahan memberikan andil sebesar 4,09 poin atau 69,07 persen dari total pertumbuhan Kota Cilegon. Perlambatan pada sektor ini (sekitar 2,30 poin) menjadi salah satu penyebab terjadinya perlambatan ekonomi Cilegon.

Berdasarkan buku laporan tahunan tahun 2013 PT. Krakatau Steel Industri baja pada tahun 2013 menghadapi kondisi yang cukup menantang karena belum pulihnya kondisi ekonomi global yang menyebabkan rendahnya daya serap pasar terhadap produk baja. Selain itu, terdapat kelebihan pasokan baja terutama dari Cina. Kedua hal tersebut menekan harga jual baja di pasar internasional.

PDRB kota Cilegon Tahun PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar), dalam

peghitungan ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.

Dari dua penyajian PDRB ini diperoleh beberapa indikator ekonomi makro yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik oleh birokrat pemerintah, peneliti maupun masyarakat dunia usaha. Indikator tersebut antara lain laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Struktur Perekonomian, Pendapatan Perkapita, indeks Harga Implisit dan Inflasi pada tingkat produsen.

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam konteks PDRB yang sangat familier (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor /lapangan usaha tersebut terdiri dari 9 (sembilan) sektor yang dikelompokkan kembali menjadi tiga kelompok sektor yaitu primer, sekunder dan tersier.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2011-2014, yaitu dari Rp. 34,63 trilyun pada tahun 2011 menjadi sekitar Rp. 55,25 trilyun pada tahun 2014. Laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku dari tahun 2011-2013 cenderung mengalami kenaikan, demikian juga dengan sektor-sektornya, kecuali pengangkutan dan komunikasi. Namun demikian, mengingat dalam kurun waktu selama empat tahun terakhir terdapat tahun dimana ada perubahan tahun mendasar. Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam tahun 2014 diasumsikan mengalami penurunan dari beberapa sektor.

Walaupun demikian kewaspadaan juga perlu ditingkatkan. Pengaruh global yang sangat kuat dapat berdampak

buruk bagi perekonomian nasional khususnya Kota Cilegon. Terutama industri petrokimia yang menjadi andalan Kota Cilegon masih mengandalkan bahan baku berupa nafta impor dari wilayah timur tengah.

Tabel 3.1
PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2011-2014
(Juta rupiah)

No.	Tahun	PDRB ADHB
1.	2011	34,636,358.27
2.	2012*)	38,762,775.22
3.	2013**)	44,164,662.08
4.	2014 ***)	55,251,552.19

Keterangan:

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kota Cilegon Tahun 2014

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000

Seiring dengan perkembangan nilai PDRB ADHB tersebut, nilai PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) dalam kurun waktu tahun 2011-2014 juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 18,07 trilyun pada tahun 2011 menjadi Rp. 21,75 trilyun pada tahun 2014.

Tabel 3.2
PDRB ADHK 2000 Kota Cilegon Tahun 2011-2014
(juta rupiah)

No.	Tahun	PDRB ADHK
1.	2011	18,078,435.40
2.	2012*)	19,470,423.66
3.	2013**)	20,624,738.48
4.	2014 ***)	21,753,319.18

Keterangan:

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Triwulanan Kota Cilegon Tahun 2014

3. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator makro yang paling banyak digunakan untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional atau nasional.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui besaran pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi akan dapat diketahui naik atau turunnya total produk yang dihasilkan suatu daerah. Indikator ini menunjukkan kemampuan berproduksi suatu daerah secara agregat dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya.

Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

Melambatnya perekonomian global dan nasional membuat aktivitas perekonomian Cilegon di tahun 2014 juga mengalami perlambatan, menurunnya permintaan membuat sektor-sektor produksi menyesuaikan tingkat produksinya agar mendapatkan harga yang sesuai.

Sepanjang tahun 2014 ekonomi Kota Cilegon mampu tumbuh sebesar 5,47 persen, melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,93 persen. Kelambatan yang terjadi sepanjang tahun 2014 berasal dari penurunan aktivitas di hampir seluruh sektor perekonomian di Kota Cilegon.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon
Tahun 2011-2014 (Persen)

No.	Sektor	Tahun			
		2011	2012*)	2013**)	2014***)
1.	Pertanian	0,38	0,87	2,70	1,13
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,70	6,89	7,24	7,50
3.	Industri Pengolahan	5,39	7,95	5,65	5,37
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,89	2,46	6,41	3,75
5.	Bangunan	8,66	8,40	10,17	11,21
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,44	10,17	7,93	6,86
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,66	4,78	2,72	4,87

No.	Sektor	Tahun			
		2011	2012*)	2013**)	2014***)
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,58	8,36	9,44	6,48
9.	Jasa-jasa	7,73	9,54	8,65	8,58
	LAJU PDRB ADHK (LPE)	5,68	7,70	5,93	5,47

Keterangan:

*) Angka Perbaikan

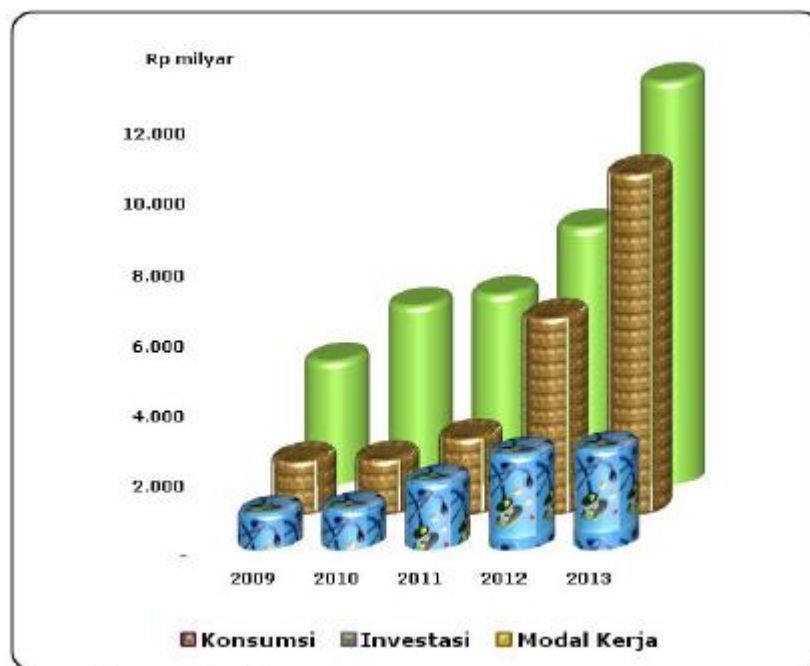
***) Angka Sementara

****) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kota Cilegon Tahun 2014

Sektor bangunan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi dengan angka pertumbuhan menyentuh 11,21 persen, hal ini terjadi karena maraknya proyek pembangunan gedung-gedung baik untuk perkantoran, industri maupun tempat tinggal sepanjang tahun 2014.

Gambar 3.1
Kinerja Kredit Perbankan di Kota Cilegon
Tahun 2009 - 2013



Sumber : PDRB Kota Cilegon, 2013

4. Inflasi

Kenaikan harga atau lebih dikenal dengan inflasi yang diuraikan di sini berbeda dengan inflasi yang diumumkan BPS setiap bulannya. Angka inflasi yang dipublikasikan BPS setiap bulan merupakan perubahan harga yang diukur dari sisi konsumen dan bersumber dari hasil survei harga terhadap beberapa komoditas yang umum dikonsumsi masyarakat.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit
PDRB Kota Cilegon Tahun 2010– 2013

Sektor	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Pertanian	9,01	5,90	5,02	8,88
Pertambangan dan penggalan	2,84	2,81	3,14	5,14
Industri pengolahan	6,42	4,96	3,56	8,34
Listrik, gas dan air bersih	2,39	2,21	6,64	8,40
Bangunan	7,38	6,91	8,36	11,61
Perdagangan, hotel dan resoran	3,91	4,14	3,18	5,42
Pengangkutan dan komunikasi	5,98	4,99	2,53	1,22
Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	5,17	4,66	4,95	4,97
Jasa-jasa	7,23	8,01	9,70	12,75
Total	5,95	4,85	3,82	7,66

Sumber : PDRB Kota Cilegon, 2013

Inflasi yang dimaksud inflasi sektoral. Inflasi sektoral menggambarkan perubahan harga pada tingkat produsen penghasil barang dan jasa. Inflasi sektoral diperoleh dari

pergerakan indeks harga implisit atau sering disebut juga sebagai deflator PDRB. Deflator

PDRB diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan kemudian dikali 100 persen.

Indeks harga implisit merupakan suatu indeks harga yang membandingkan antara nilai produk yang dihitung berdasarkan harga berlaku dengan nilai produk yang dinyatakan dalam harga pada tahun dasar. Bila laju perubahan indeks harga implisit dihitung, maka besaran yang dihasilkannya dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat inflasi pada level produsen yang terjadi di suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Secara metodologi, inflasi indeks harga implisit berbeda dengan inflasi yang diperoleh dari indeks harga konsumen (IHK) sehingga angka yang dihasilkannya pun akan berbeda.

Secara umum, laju perubahan indeks harga implisit tahun 2013 adalah 7,66 persen dengan nilai terendah terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi dengan pertumbuhan indeks sebesar 1,22 persen dan nilai tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa dengan nilai sebesar 12,75 persen.

Secara umum laju indeks sektoral berada di atas laju indeks total kecuali sektor pertambangan dan penggalan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang berada di bawah rata-rata nilai indeks implisit total.

5. PDRB Perkapita

Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya memperhatikan kenaikan PDRB secara total, tetapi perlu juga dilihat perkembangan PDRB per kapita, khususnya pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000.

Perlu dipahami bahwa angka PDRB per kapita ini masih bersifat kotor (bruto). Karena angka tersebut ini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk antar daerah. Secara teknis, dibutuhkan pendataan khusus atau survei khusus untuk mengetahui besarnya transfer dari pendapatan penduduk dan perusahaan di suatu daerah. Akan tetapi penghitungan pendapatan perkapita Kota Cilegon belum dapat dilakukan karena ketiadaan informasi tentang pendapatan faktor produksi yang masuk dan keluar Kota Cilegon. Namun demikian, PDRB per kapita masih banyak digunakan di berbagai daerah dan dianggap cukup memadai sebagai salah satu indikator kemakmuran atau potensi ekonomi daerah.

Atas dasar hal tersebut, PDRB perkapita dapat digunakan sebagai pendekatan bagi pendapatan perkapita. Hal ini didasari dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk ke Kota Cilegon. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Gambar 3.2
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Cilegon
Tahun 2010 -2013



Sumber : PDRB Kota Cilegon, 2013

PDRB per kapita Kota Cilegon tahun 2013 sebesar Rp.101,88 juta meningkat sebesar 12 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.99,00 juta.

Peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tidak menggambarkan peningkatan pendapatan riil, karena pada PDRB perkapita pengaruh kenaikan harga masih sangat dominan.

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Bila dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000 akan diketahui pertumbuhan PDRB perkapita secara riil. Pada tahun 2013 PDRB perkapita atas dasar harga konstan Kota Cilegon mengalami kenaikan sebesar 4,04 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp.49,77 juta menjadi sebesar Rp.51,78 juta.

6. Nilai dan Laju Pertumbuhan Investasi Tahun 2013-2014

Seiring dengan perkembangan nilai investasi (PMA+PMDN) Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2013-2014, pertumbuhan nilai investasi (PMA+PMDN) juga mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan nilai investasi (PMA+PMDN) Kota Cilegon dari 2,93% pada tahun 2013 dan diperkirakan menjadi sekitar ,3,00% pada tahun 2014. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan nilai dan laju pertumbuhan investasi Kota Cilegon tahun 2013-2014**.

Tabel 3.5
Perkembangan Nilai dan Laju Pertumbuhan Investasi
Kota Cilegon Tahun 2013-2014

No.	Uraian	Satuan	2013	2014*
1	Nilai Investasi PMA	Rp. Milyar	150.210	155.000
2	Nilai Investasi PMDN	Rp. Milyar	16.605	16.810
3	Nilai Investasi PMA+PMDN	Rp. Milyar	166.613	171.605
4	Laju Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	%	3,09	3,19
5	Laju Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	%	1,50	1,23
6	Laju Pertumbuhan Nilai Investasi PMA+PMDN	%	2,93	3,00

Sumber : KPM Kota Cilegon, Tahun 2013

Keterangan : * Angka Proyeksi

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015-2016

Kondisi ekonomi makro Kota Cilegon perkiraan tahun 2015-2016 secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut, mengacu pada produk domestik regional bruto untuk laju pertumbuhan ekonomi meningkat, pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon diperkirakan sebesar 5,48 % dan tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,50 % kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya di karenakan adanya investasi dengan nilai yang besar yang telah membangun di Kota Cilegon, sedangkan angka agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan meningkat namun tidak begitu signifikan yaitu diperkirakan sebesar Rp.22,94 triliyun pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 24,20 triliyun, untuk pendapatan PDRB perkapita masyarakat Kota Cilegon tahun 2015 diperkirakan sekitar Rp. 54,31 juta/jiwa dan di perkirakan untuk tahun 2016 sekitar Rp. 56,45 juta/jiwa dan laju inflasi tahun 2015-2016 diproyeksikan sebesar 4,50%, jika dilihat dari trennya masih relatif stabil namun ada beberapa kelompok komoditi yang harus di waspadi sehingga dapat memicu terjadinya kenaikan nilai inflasi, salah satunya dari variable kelompok komoditi sandang, dikarenakan imbas dari krisis global sehingga ada kenaikan biaya produksi, dampak ini menyebabkan harga produksi meningkat yang pada gilirannya menyebabkan perusahaan menaikkan harga untuk menjaga keuntungan biaya tenaga kerja, dan secara makro perkiraan perekonomian untuk tahun 2015-2016 dapat kami tampilkan pada table di bawah ini :

Tabel 3.6
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Cilegon
Tahun 2014-2016

NO.	INDIKATOR KINERJA PEREKONOMIAN	PROYEKSI	
		2015	2016
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,48	5,50
2.	PDRB ADHK (Rp.Triliyun)	22.94	24.20
3.	PDRB ADHB (Rp. Triliyun)	54.23	59.99
4.	PDRB ADHK Perkapita (Rp. Juta/Jiwa)	54.31	56.45
5.	PDRB ADHB Perkapita (Rp. Juta/Jiwa)	122.06	131.11
6.	Inflasi	4,50	4,50

Sumber : Bappeda Kota Cilegon

Stabilitas ekonomi yang perlahan-lahan pulih, maka langkah langkah yang akan ditempuh ditengah pemulihan perekonomian global yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian, perekonomian Kota Cilegon yang merupakan dari bagian perekonomian nasional terus menunjukkan perbaikan, beberapa indikator utama dapat dilihat dari tahun ke tahun, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang berangsur angsur menurun, nilai tukar rupiah yang pada akhir akhir ini menunjukkan kestabilan yang kuat karena kepercayaan pasar terhadap kinerja perekonomian dan keamanan yang menyebabkan tumbuhnya nilai-nilai investasi yang baru.

Namun untuk mendukung target kinerja ekonomi makro tersebut perlu di dukung dengan kebijakan kebijakan strategis oleh pemerintah daerah sehingga target yang di harapkan dapat tercapai sesuai dengan yang di rencanakan, beberapa pendekatan kebijakan prioritas daerah guna mendukung pencapaian target ekonomi makro diantaranya :

1. Kebijakan Pro Growth

Pembangunan infrastruktur yang direncanakan tahun 2016 adalah dimulainya pembebasan lahan untuk jalan lingkar utara yang merupakan sebagai akses alternatif menuju ke pelabuhan penyeberangan dari pulau jawa ke pulau sumatera, pembangunan jalan ini disamping sebagai alternatif pemecah jalur kemacetan menuju pelabuhan penyeberangan merak, disamping itu juga sebagai perintis dari akses pengembangan pembangunan infrasturktur, yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian, peningkatan jalur lingkar selatan juga menjadi salah satu aspek percepatan pertumbuhan perekonomian yang menjadi tempat perluasan pertumbuhan perdagangan dan jasa dikota cilegon.

2. Kebijakan Pro Poor

Bentuk komitmen kepala daerah berbagai program *pro poor* tersebut antara lain bantuan langsung masyarakat miskin, pembebasan beras kepada masyarakat miskin, pendidikan gratis dan kesehatan dasar gratis, santunan bantuan kematian, disamping itu juga telah di bangun komitmen bersama kepada pelaku dunia industri dengan pemerintah Kota Cilegon dalam penyelarasan program corporate sosial responsibility (CSR).

3. Kebijakan Pro Job

Kebijakan *pro job* yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon adalah melakukan pola padat karya di 43 kelurahan adapun mekanismenya yaitu melalui kelompok Pemberdayaan

Masyarakat di tiap tiap kelurahan, disamping itu juga dilakukan pada program pemberian bantuan modal bergulir dan peningkatan penjangkauan pembinaan ketenagakerjaan melalui balai latihan kerja.

4. Kebijakan Pro Environment

Untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional yaitu penurunan beban pencemaran dan penurunan tingkat polusi dengan mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat di daerah serta memperkuat pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup daerah. Disamping itu kegiatan bidang Lingkungan Hidup diarahkan untuk mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). pemantauan kualitas air, untuk pengurangan limbah (seperti biogas, 3R, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dukung dengan Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon untuk tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, diwujudkan dengan finalisasi hasil review RTRW 2010-2030 yang diikuti dengan dokumen RDTR dan UKL UPK serta dokumen amdal sebagai pedoman memperhatikan dan pengawasan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

5. Kebijakan Fiskal

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah yang sudah ada dan juga menggali potensi-potensi baru sehingga pendapatan daerah dapat dinaikan, selain dari sisi pendapatan, kebijakan keuangan daerah pun harus meyeentuh sisi pembelanjaan dari anggaran pendapatan daerah, kebijakan dari sisi ini adalah

meningkatkan efisiensi belanja dalam pembangunan melalui analisis kebutuhan belanja dari masing-masing SKPD sehingga nilai belanjanya dapat dipergunakan secara efisien dan efektif, selain itu dapat diprioritaskan belanja-belanja yang memiliki nilai stimulan pada perekonomian daerah.

Berdasarkan berbagai perkembangan ekonomi daerah dan permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi, maka tantangan dan prospek ekonomi yang dihadapi oleh Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Kinerja perekonomian didorong melalui percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan dan mengoptimalkan produktivitas seluruh sektor-sektor perekonomian.

2. Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran sementara daya serap tenaga kerja masih sangat terbatas, maka diperlukan adanya upaya untuk mendorong percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha yang luas, peningkatan keterampilan kerja bagi angkatan kerja, pemberian kemudahan akses bagi masyarakat (khususnya masyarakat miskin) terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan (*participative development*).

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi perekonomian daerah agar dapat meningkatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga kegiatan transaksi bisnis dan investasi dalam keadaan stabil diperlukan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah yang kondusif. Disamping itu, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi serta paket kebijakan investasi yang dapat mendorong minat investasi juga sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi di daerah.

Untuk menjaring lebih banyak lagi investor ke Kota Cilegon, disamping perlu dilakukan promosi yang lebih intensif, diperlukan juga kebijakan yang dapat mendukung iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi para investor.

4. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah

Dengan semakin meningkatnya ketergantungan daerah terhadap pusat yang ditandai dengan relatif masih rendahnya proporsi pendapatan asli daerah dibanding pendapatan yang diterima dari pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Provinsi), menuntut daerah untuk semakin besar mengambil peran dan semakin lebih kreatif dan inovatif dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, daerah juga harus lebih memperhatikan dan mengintensifkan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi pendapatan asli daerah. Namun demikian, upaya kreativitas, inovasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi tersebut harus senantiasa berada pada koridor hukum yang berlaku,

dalam arti bahwa upaya tersebut harus tetap memperhatikan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku agar kelak tidak menimbulkan implikasi negatif pada masyarakat secara umum atau pada kelangsungan secara ekonomis dan ekologis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan alokasi, proporsi, dan komposisi belanja serta pembiayaan daerah. Belanja daerah harus lebih bisa diarahkan pada keseimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah juga harus lebih dititikberatkan pada pembiayaan yang bersifat penerimaan sehingga mampu mempertahankan stabilitas keuangan daerah atau bahkan meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

5. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak swasta

Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan yang dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah yang saling berdekatan, menghasilkan produk pembangunan yang kurang optimal. Kerjasama yang menjadi prioritas antara lain mengenai kerjasama pengembangan sektor UKM, kerjasama bidang investasi dan perdagangan, serta kerjasama di bidang industri.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penyelenggaraan pemerintahan mempunyai fungsi untuk mendorong dan memfasilitasi pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan agar pemerintah daerah mampu menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal sehingga arah pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Melalui desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan keuangan yang tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah bermanfaat dalam pengelolaan dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rekapitulasi dan proyeksi kerangka pendanaan pembangunan kota cilegon sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Cilegon
Tahun 2013-2016

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)			
		Realisasi APBD-P 2013	Realisasi APBD-P 2014	APBD 2015	2016
	PENDAPATAN DAERAH	1.096.751.657.161,-	1.304.405.754.200,-	1.330.097.081.925,-	1.397.191.335.355,-
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	291.943.585.049,-	467.950.299.677,-	442.259.124.700,-	466.281.553.180,-
1.1	Hasil Pajak Daerah	177.144.972.228,-	340.323.435.803,-	301.200.000.000,-	318.000.000.000,-
1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.464.239.480,-	14.382.400.039,-	21.105.111.500,-	18.036.480.050,-
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.141.337.962,-	12.337.091.175,-	13.641.651.200,-	15.954.032.510,-
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	78.193.035.379,-	100.907.297.660,-	106.312.362.000,-	114.291.040.620,-
2	DANA PERIMBANGAN	584.451.233.333,-	564.516.830.610,-	597.868.715.000,-	636.713.203.370,-
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	117.494.629.333,-	73.454.925.610,-	83.492.691.000,-	89.337.179.370,-
2.2	Dana Alokasi Umum	461.398.284.000,-	490.917.599.000,-	514.376.024.000,-	547.376.024.000,-
2.3	Dana Alokasi Khusus	5.558.320.000,-	144.306.000,-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	220.356.838.779,-	271.938.623.913,-	289.969.242.225,-	294.196.578.805,-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	114.905.858.779,-	134.666.607.913,-	144.546.731.600,-	151774.068.180,-
3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	100.450.980.000,-	107.047.516.000,-	104.553.782.000,-	101553782000
3.5	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.000.000.000,-	30.224.500.000,-	40.868.728.625,-	40868728625

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh

Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Instrumen kebijakan keuangan daerah adalah pemasukan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak daerah karena jika pemerintah daerah mengubah tarif pajak daerah yang berlaku, maka hal ini akan berpengaruh/berdampak pada perekonomian daerah. Sebagai contoh, jika tarif pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output, sebaliknya kenaikan tarif pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan keuangan daerah lebih menekankan pada upaya pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah daerah, termasuk juga pembiayaan daerah. Kebijakan ini lebih terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi makro daerah serta memperhatikan berbagai asumsi yang mendasari perhitungan perkiraan indikator ekonomi makro dan kapasitas keuangan daerah, maka kebijakan keuangan daerah Kota Cilegon tahun 2016 diarahkan menuju **“Kebijakan Anggaran Berimbang (*Balanced Budgeting*)”**. Kebijakan ini merupakan kebijakan menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan, dalam

arti lain kebijakan ini mengupayakan tidak terjadinya defisit ataupun surplus anggaran jika dilihat dari pemasukan dan pengeluaran. Kebijakan ini bertujuan mendapatkan kepastian dan meningkatkan disiplin anggaran.

Dalam mendukung arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana yang telah ditentukan tersebut perlu dibuat kebijakan turunannya, yaitu arah kebijakan yang terkait pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta arah kebijakan yang terkait dengan pembiayaan daerah.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah untuk pembangunan diupayakan untuk dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Disamping itu, hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari pos pajak dan retribusi daerah, yaitu efeknya terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Dimana upaya tersebut hendaknya sedapat mungkin tidak membebani masyarakat, sehingga potensi munculnya efek distorsi ekonomi yang kontra produktif dan akan sangat merugikan dapat hindari.

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, selain itu juga harus digali potensi-potensi pendapatan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan arah yang mengatur tentang kebijakan dalam pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah serta merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan kebijakan pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 meliputi kebijakan dalam penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, serta dirinci menurut organisasi SKPD, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari komponen/pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Proyeksi pendapatan asli daerah

Melihat struktur PAD Kota Cilegon, sektor terbesar penyumbang PAD adalah sektor penerangan jalan umum (PJU) yang dalam hal ini sangat bergantung kepada aktifitas industri. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya kenaikan pada sektor industri akan berdampak kepada kenaikan pajak PJU.

Sebuah model yang dapat mengkaitkan antara berbagai variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap kenaikan pajak PJU, merupakan salah satu pendekatan model untuk memproyeksikan PAD. Namun tentu hal ini merupakan model yang cukup rumit. Sehingga proyeksi PAD dalam hal ini digambarkan melalui pendekatan data historis PAD, yang membentuk model regresi kuadratik sebagai berikut :

$$PAD = C + at + bt^2$$

dimana : C = Konstanta

a,b = Koefisien regresi

t = Waktu (tahun)

Asumsi dasar dalam penyusunan model ini adalah adanya kestabilan kondisi sosial ekonomi internal (skala kota).

Proyeksi dana perimbangan

Asumsi yang digunakan adalah kenaikan laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun berjalan. Nilai LPE menggambarkan kondisi perekonomian nasional, yang berdampak terhadap transfer anggaran daerah. Makin tinggi LPE nasional di tahun berjalan, maka dana transfer daerah di tahun berikutnya akan meningkat, dengan asumsi bahwa celah fiskal Kota Cilegon masih menunjukkan nilai positif.

Meskipun LPE daerah senantiasa meningkat, dan memiliki nilai di atas 5%, namun proporsi PAD terhadap APBD masih sangat kecil, sehingga celah fiskal Kota Cilegon masih menunjukkan nilai positif, atau masih sangat bergantung kepada alokasi dana perimbangan.

Proyeksi lain-lain pendapatan

Proyeksi tahun 2016 yang diperoleh dari bagi hasil pajak provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah khususnya dari bantuan keuangan provinsi, faktor yang dipertimbangkan adalah realisasi bagi hasil pajak provinsi tahun sebelumnya, serta proyeksi kenaikan bagi hasil pajak provinsi dan pajak bawah tanah, yang merupakan komponen utama penyumbang anggaran lain-lain pendapatan.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini

digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Arah kebijakan ini terdiri dari arah kebijakan belanja langsung dan arah kebijakan belanja tidak langsung. Arah kebijakan belanja langsung merupakan arah kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan arah kebijakan belanja tidak langsung merupakan arah kebijakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta sulit diukur dengan capaian kinerja yang ditetapkan seperti: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja

sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa dan juga sektor bangunan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus sedapat mungkin ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti : kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat.

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta pengembangan

sistem jaminan sosial. Arah kebijakan ini terdiri dari arah kebijakan belanja langsung dan arah kebijakan belanja tidak langsung. Arah kebijakan belanja langsung merupakan arah kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan arah kebijakan belanja tidak langsung merupakan arah kebijakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta sulit diukur dengan capaian kinerja yang ditetapkan seperti: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa dan juga sektor bangunan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus sedapat mungkin ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti : kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat.

Pola yang digunakan dalam penyusunan anggaran belanja daerah tahun 2016 adalah pola pendekatan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, dengan melihat prioritas daerah Tahun 2016, serta pendekatan ***money follow function***, dalam perencanaan anggarannya, maka belanja daerah diutamakan untuk kegiatan prioritas daerah yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Cilegon
Tahun 2013-2016

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)			
		Realisasi APBD-P 2013	Realisasi APBD-P 2014	APBD 2015	2016
	BELANJA	1.002.109.782.540,-	1.222.804.814.553,-	1.564.304.620.447,-	1.397.191.335.355,-
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	483.850.506.778,-	537.267.316.456,-	691.639.755.045,-	659.099.361.401,-
	Belanja Pegawai	441.831.441.621,-	481.045.458.644,-	607.334.161.620,-	625.971.802.976,-
	Belanja Subsidi	-	3.322.656.000,-	-	-
	Belanja Hibah	31.237.355.000,-	32.892.257.725,-	62.858.651.000,-	9.725.000.000,-
	Belanja Bantuan Sosial	10.166.601.000,-	19.482.623.675,-	19.714.986.000,-	17.370.602.000,-
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	615.109.157,-	512.320.412,-	1.031.956.425,-	1.031.956.425,-
	Belanja Tidak Terduga	-	12.000.000,-	700.000.000,-	5.000.000.000,-
	BELANJA LANGSUNG	518.259.275.762,-	685.537.498.097,-	872.664.865.402,-	738.091.973.954,-
	Belanja Pegawai	89.131.138.132,-	86,760,804,863,-	105.393.974.254,-	188.454.315.995,-
	Belanja Barang dan Jasa	89.131.138.132,-	281,231,356,115,-	362.645.343.714,-	298.436.543.969,-
	Belanja Modal	206.273.890.562,-	317,545,337,119,-	404.625.547.434,-	251.201.113.990,-

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pos untuk menutupi defisit ataupun surplus dari anggaran, untuk proyeksi pendapatan dan belanja pada RPJMD 2010-2015 diasumsikan tidak terdapat alokasi pembiayaan, baik dari penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan.

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Arah kebijakan pembiayaan dalam APBD berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 174 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Cilegon
Tahun 2013-2016

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)			
		Realisasi APBD-P 2013	Realisasi APBD-P 2014	APBD 2015	2016
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	213.780.084.595,-	287,509,439,105,-	336.218.418.122,-	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	213.780.084.595,-	287,509,439,105,-	217.707.538.522,-	
	Pencairan Dana Cadangan			20.000.000.000,-	
	Pencairan Dana Deposito			98.510.879.600,-	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.792.400.000,-	17,321,900,000,-	102.010.879.600,-	
	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,-	10,000,000,000,-	-	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.792.400.000,-	7,321,900,000,-	100.010.879.600,-	
	Pengeluaran Investasi Non Permanen	-	-	2.000.000.000,-	
	PEMBIAYAAN NETTO	192.987.684.595,-	270,187,539,105,-	234.207.538.522,-	

Adapun rincian realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah kota cilegon adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Daerah Kota Cilegon Tahun 2013-2016

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)			
		Realisasi APBD-P 2013	Realisasi APBD-P 2014	APBD 2015	2016
	PENDAPATAN DAERAH	1.096.751.657.161,-	1.304.405.754.200,-	1.330.097.081.925,-	1.397.191.335.355,-
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	291.943.585.049,-	467.950.299.677,-	442.259.124.700,-	466.281.553.180,-
1.1	Hasil Pajak Daerah	177.144.972.228,-	340.323.435.803,-	301.200.000.000,-	318.000.000.000,-

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)			
		Realisasi APBD-P 2013	Realisasi APBD-P 2014	APBD 2015	2016
1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.464.239.480,-	14.382.400.039,-	21.105.111.500,-	18.036.480.050,-
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.141.337.962,-	12.337.091.175,-	13.641.651.200,-	15.954.032.510,-
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	78.193.035.379,-	100.907.297.660,-	106.312.362.000,-	114.291.040.620,-
2	DANA PERIMBANGAN	584.451.233.333,-	564.516.830.610,-	597.868.715.000,-	636.713.203.370,-
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	117.494.629.333,-	73.454.925.610,-	83.492.691.000,-	89.337.179.370,-
2.2	Dana Alokasi Umum	461.398.284.000,-	490.917.599.000,-	514.376.024.000,-	547.376.024.000,-
2.3	Dana Alokasi Khusus	5.558.320.000,-	144.306.000,-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	220.356.838.779,-	271.938.623.913,-	289.969.242.225,-	294.196.578.805,-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	114.905.858.779,-	134.666.607.913,-	144.546.731.600,-	151774.068.180,-
3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	100.450.980.000,-	107.047.516.000,-	104.553.782.000,-	101.553.782.000,-
3.5	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.000.000.000,-	30.224.500.000,-	40.868.728.625,-	40.868.728.625,-
	BELANJA	1.002.109.782.540,-	1.222.804.814.553,-	1.564.304.620.447,-	1.397.191.335.355,-
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	483.850.506.778,-	537.267.316.456,-	691.639.755.045,-	659.099.361.401,-
	Belanja Pegawai	441.831.441.621,-	481.045.458.644,-	607.334.161.620,-	625971802976,-
	Belanja Subsidi	-	3.322.656.000,-	-	-
	Belanja Hibah	31.237.355.000,-	32.892.257.725,-	62.858.651.000,-	9725000000
	Belanja Bantuan Sosial	10.166.601.000,-	19.482.623.675,-	19.714.986.000,-	17370602000
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	615.109.157,-	512.320.412,-	1.031.956.425,-	1.031.956.425,-
	Belanja Tidak Terduga	-	12.000.000,-	700.000.000,-	5000000000

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)			
		Realisasi APBD-P 2013	Realisasi APBD-P 2014	APBD 2015	2016
	BELANJA LANGSUNG	518.259.275.762,-	685.537.498.097,-	872.664.865.402,-	738091973954
	Belanja Pegawai	89.131.138.132,-	86,760,804,863,-	105.393.974.254,-	188454315995
	Belanja Barang dan Jasa	89.131.138.132,-	281,231,356,115,-	362.645.343.714,-	298436543969
	Belanja Modal	206.273.890.562,-	317,545,337,119,-	404.625.547.434,-	251201113990
	SURPLUS / (DEFISIT)	94.641.874.621,-	81,596,089,647,-	(234.207.538.522,-)	0,00
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	213.780.084.595,-	287,509,439,105,-	336.218.418.122,-	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	213.780.084.595,-	287,509,439,105,-	217.707.538.522,-	
	Pencairan Dana Cadangan			20.000.000.000,-	
	Pencairan Dana Deposito			98.510.879.600,-	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.792.400.000,-	17,321,900,000,-	102.010.879.600,-	
	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,-	10,000,000,000,-	-	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.792.400.000,-	7,321,900,000,-	100.010.879.600,-	
	Pengeluaran Investasi Non Permanen	-	-	2.000.000.000,-	
	PEMBIAYAAN NETTO	192.987.684.595,-	270,187,539,105,-	234.207.538.522,-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	287.629.559.216,-	351,783,628,752,-	0,00	0,00
	KOREKSI DAN PENYESUAIAN	120.120.111,-			
	SILPA SETELAH KOREKSI DAN PENYESUAIAN	287.509.439.105,-			